

JURNAL SKRIPSI

**EVALUASI POTENSI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

APRIS KHOIR FRENDY
B 200 070 095

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan dibawah ini telah membaca skripsi berjudul:

EVALUASI POTENSI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI
KABUPATEN WONOGIRI

Yang ditulis oleh:

Nama : Apris Khoir Frendy

Nim : B. 200 070 095

Penandatangan berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2012

Pembimbing Utama



(Banu Witono, SE., AK.)



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Triyono, SE, M.Si.)

ABSTRAK

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD), maka pemerintah daerah harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerah serta menggali potensi-potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pendapatan asli daerah dari tiap sektor pajak dan retribusi daerah, perumusan target penerimaan pajak dan retribusi daerah, tingkat pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah, dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data-data sekunder dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri. Periode tahun anggaran yang diteliti adalah tahun 2007-2009. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis potensi pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah, perumusan target, target dan realisasi, dan analisis efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Potensi jenis pajak daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2009 yang mempunyai kualifikasi sebagai pajak daerah yang berkategori prima adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak Penerangan Jalan Umum, dan pajak bahan galian golongan C. Seluruh jenis retribusi memiliki peluang untuk ditingkatkan lagi di masa mendatang; (2) Perumusan target penerimaan pajak dan retribusi daerah didasarkan pada proses *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya; (3) Realisasi pajak daerah Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2009 sudah melebihi target yang diharapkan, sedangkan penerimaan retribusi belum mencapai target yang diharapkan; (4) Rata-rata efisiensi pemungutan pajak daerah mencapai 16,17%, sedangkan efisiensi pemungutan retribusi daerah mencapai rata-rata 4,83%. Artinya masih di bawah 100%, sehingga pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri sudah efisien.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Potensi, Target, Realisasi, Efisiensi*

A. Pendahuluan

Usaha untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah retribusi daerah. Mengingat pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) maka pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri harus berusaha mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak daerahnya untuk meningkatkan PAD yang digunakan untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Sasaran penting untuk mencapai efisiensi tersebut adalah: pertama, usaha meningkatkan penerimaan pajak yang lebih realistis dengan mengurangi biaya-biaya pengeluaran dan diharapkan sumber-sumber pembiayaan tersebut didapatkan dari sumber yang bersangkutan; kedua, meningkatkan kemampuan dan pemantauan serta pengawasan secara efektif dan efisien terhadap anggaran biaya operasional dan pemeliharaan yang digunakan untuk pengelolaan pajak daerah (Masykur, 2000).

Kabupaten Wonogiri, sebagai daerah otonom di dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah, diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah sehingga nantinya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Pajak daerah yang diterapkan oleh pemerintah daerah, baik yang ditentukan oleh undang-undang pajak daerah maupun yang merupakan perluasan objek pajak pun juga beragam. Namun, bila diteliti keadaannya masing-masing

daerah belum mampu menunjukkan kinerjanya sebagai sumber penerimaan daerah dalam APBD melalui PAD. Dari peraturan pajak daerah yang ada beberapa diantaranya mempunyai biaya administrasi yang lebih tinggi daripada hasilnya (*high cost of collection*), sehingga hasilnya tidak memadai. Juga adanya beberapa jenis pajak yang tidak memadai untuk dipungut daerah, karena tumpang tindih dengan pajak yang lain, menghambat efisiensi alokasi sumber ekonomi, bersifat tidak adil, atau tidak benar-benar bersifat pajak, tetapi cenderung bersifat retribusi. Untuk itu agar pajak daerah menjadi lebih efektif dan efisien, maka pada tahun 1997 pemerintah telah melakukan reformasi terhadap aturan pajak daerah dan retribusi yang ada sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan perekonomian nasional (Kurniawan dan Kuncoro, 2004: 2).

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul "EVALUASI POTENSI PENDAPATAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI."

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang hendak diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah potensi pendapatan asli daerah dari tiap sektor pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri ?
2. Bagaimanakah perumusan target penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri ?
3. Bagaimanakah tingkat pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri ?

4. Bagaimanakah tingkat efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Potensi pendapatan asli daerah dari tiap sektor pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri.
2. Perumusan target penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri
3. Tingkat pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri
4. Tingkat efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah literatur mengenai efisiensi pemungutan pajak
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan bagi organisasi khususnya Pemerintah Daerah sebagai bahan informasi agar Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dapat mengetahui besarnya tingkat pencapaian target penerimaan pajak daerah dan efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Wonogiri.
3. Dapat memberikan kontribusi terhadap akademisi, dosen, dan mahasiswa sebagai tambahan referensi dalam melakukan penelitian sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pendapatan Daerah

Berdasar Undang-Undang No.32 tahun 2004 pasal 1 ayat (15) yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.12 tahun 2008, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bersumber dari: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Pajak Daerah

Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 sebagai pengganti Undang-Undang nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pasal 1 dijelaskan bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Jenis-jenis pajak tersebut adalah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

3. Retribusi Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang No.34 tahun 2000 pasal 1 ayat (26) tentang Pajak daerah dan retribusi daerah bahwa retribusi daerah adalah

pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan PP. No.66 tahun 2001 tentang retribusi daerah sebagai peraturan pelaksanaan yang menetapkan jenis-jenis retribusi daerah sebagai berikut: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran mengenai potensi, target penerimaan pajak daerah dan efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Wonogiri.

1. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu berupa : Target dan realisasi PAD Kabupaten Wonogiri tahun 2007-2009; Target dan realisasi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2007-2009; Biaya pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri tahun 2007-2009; Gambaran umum pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Sedangkan sumber data diperoleh dari: Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D) Kabupaten Wonogiri; Berbagai literatur buku mengenai pajak dan keuangan daerah, peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan peraturan daerah yang berhubungan dengan penelitian.

2. Teknik Analisis Data

a. Teknik analisis untuk mengetahui potensi sektor pajak dan retribusi

Menurut UU No.18/1997 ada 4 (empat) macam kajian yang dapat dilakukan terhadap kecenderungan dari pajak dan retribusi daerah yaitu:

- 1) Perhitungan potensi pajak dan retribusi dilakukan terhadap sektor yang diberlakukan pajak dan retribusi dengan rumus *Collection Ratio*
- 2) Kajian atas perhitungan nilai pertumbuhan dari waktu ke waktu, baik terhadap pajak daerah maupun retribusi daerah
- 3) Kajian atas perhitungan nilai kontribusi dari waktu ke waktu, baik terhadap pajak daerah maupun retribusi daerah
- 4) Kajian atas perhitungan berdasar matrik potensi, baik terhadap pajak daerah maupun retribusi daerah

b. Teknik analisis untuk mengetahui perumusan target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Artinya penentuan target anggaran dari setiap komponen jenis pajak/retribusi daerah didasarkan pada kondisi riil di lapangan yang benar-benar menjadi pertimbangan dari pihak pengelola anggaran daerah (dinas pendapatan daerah).

c. Teknik analisis untuk mengetahui pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah. Untuk mengukur pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perdagangan dan Perpajakan Daerah (DP2D).

d. Teknik analisis untuk mengetahui efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah.

G. Hasil Penelitian

1. Analisis Potensi Sektor Pajak dan Retribusi

Perhitungan matrik potensi pajak daerah dilakukan untuk mengetahui apakah masuk dalam kategori Prima, Potensial, Berkembang, atau Terbelakang. Dari hasil analisis jenis pajak daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2009 mempunyai kualifikasi sebagai pajak daerah yang berkategori prima adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak Penerangan Jalan Umum, dan pajak bahan galian golongan C. Sedangkan yang termasuk kategori dapat dikembangkan adalah pajak hotel, restoran, dan pajak parkir. Seluruh jenis retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2009 mempunyai kualifikasi sebagai retribusi daerah yang berkategori prima. Hal ini karena seluruh jenis retribusi memiliki pertumbuhan yang lebih dari 1 dan kontribusi juga lebih dari 1. Artinya seluruh jenis retribusi memiliki peluang untuk ditingkatkan lagi di masa mendatang.

2. Perumusan Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Kecenderungan yang selama ini terjadi terhadap penetapan anggaran pada pos pajak dan retribusi daerah, yaitu bahwa penetapan target-target dari setiap jenis pajak/retribusi daerah di dalam PAD hanya didasarkan atas proses *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada potensi yang sebenarnya.

Target penerimaan retribusi daerah tahun 2008 adalah peningkatan sebesar 26,35% dari penerimaan retribusi daerah tahun 2007. Target penerimaan retribusi daerah tahun 2009 adalah peningkatan sebesar 27,47% dari penerimaan retribusi daerah tahun 2008. Target yang sudah benar kemudian dikaitkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan mempunyai

rasio cakupan (*coverage ratio*) yang diharapkan akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

3. Pencapaian Target Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah

Realisasi pajak daerah pada tahun 2007 mencapai sebesar Rp.5.620.500.000 atau mencapai 107,26% dari target. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 7.319.157.443 atau mencapai 108,92% dan pada tahun 2009 realisasi pajak daerah meningkat menjadi Rp. 9.013.653.566 atau mencapai 110,66% dari target. Artinya pajak daerah sudah melebihi target yang diharapkan.

Realisasi retribusi daerah pada tahun 2007 mencapai sebesar Rp.18.400.725.000 atau hanya mencapai 95,14% dari target. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 22.229.903.722 atau mencapai 95,62% dan pada tahun 2009 realisasi retribusi daerah meningkat menjadi Rp. 27.234.020.695 atau mencapai 96,11% dari target.

Berdasarkan data pajak daerah dan retribusi daerah di atas, maka target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan dan kemampuan institusi penghasil pendapatan meningkat dari waktu ke waktu untuk meraih pendapatan yang dikelola oleh institusi tersebut.

4. Efisiensi Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Efisiensi merupakan ukuran yang menunjukkan bagian dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya pemungutan pajak yang bersangkutan. Efisiensi menunjukkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Semakin kecil biaya pemungutan

pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah, semakin efisien pemungutan pajak dan retribusi daerah. Tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada pajak restoran dimana rata-rata biaya yang dikeluarkan mencapai 28,67%, sedangkan efisiensi terendah terjadi pada pajak hiburan yang hanya membutuhkan biaya 0,91%.

Berdasarkan perhitungan efisiensi dapat dinyatakan bahwa rata-rata efisiensi pemungutan pajak mencapai 16,17%, sedangkan efisiensi pemungutan retribusi daerah mencapai rata-rata 4,83%. Artinya masih di bawah 100%, sehingga pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri sudah efisien.

H. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Potensi jenis pajak daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2009 yang mempunyai kualifikasi sebagai pajak daerah yang berkategori prima adalah pajak hiburan, pajak reklame, pajak Penerangan Jalan Umum, dan pajak bahan galian golongan C. Sedangkan yang termasuk kategori dapat dikembangkan adalah pajak hotel, restoran, dan pajak parkir. Selanjutnya seluruh jenis retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2007-2009 mempunyai kualifikasi sebagai retribusi daerah yang berkategori prima. Hal ini karena seluruh jenis retribusi memiliki pertumbuhan yang lebih dari 1 dan kontribusi juga lebih dari 1. Artinya seluruh jenis retribusi memiliki peluang untuk ditingkatkan lagi di masa mendatang.

2. Perumusan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dilakukan untuk meningkatkan jumlah penerimaannya. Penetapan target-target dari setiap jenis pajak/retribusi daerah di dalam PAD hanya didasarkan atas proses *incremental* (peningkatan) sebesar sekian persen dibanding tahun-tahun sebelumnya, tanpa didasarkan pada matrik potensi. Target yang sudah benar kemudian dikaitkan dengan realisasi yang terjadi di lapangan yaitu rasio cakupan (*coverage ratio*) yang diharapkan akan terus meningkat dari waktu ke waktu
3. Realisasi pajak daerah pada tahun 2007 mencapai 107,26% dari target. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 7.319.157.443 atau mencapai 108,92% dan pada tahun 2009 realisasi pajak daerah meningkat menjadi Rp. 9.013.653.566 atau mencapai 110,66% dari target. Artinya pajak daerah sudah melebihi target yang diharapkan. Selanjutnya realisasi retribusi daerah pada tahun 2007 mencapai sebesar Rp. 18.400.725.000 atau hanya mencapai 95,14% dari target. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 22.229.903.722 atau mencapai 95,62% dan pada tahun 2009 realisasi retribusi daerah meningkat menjadi Rp. 27.234.020.695 atau mencapai 96,11% dari target. Artinya penerimaan retribusi belum mencapai target yang diharapkan.
4. Efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri masih di bawah 100%, sehingga dinyatakan sudah efisien. Tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada pajak restoran dimana rata-rata biaya yang dikeluarkan mencapai 28,67%, sedangkan efisiensi terendah terjadi pada pajak hiburan yang hanya membutuhkan biaya 0,91%. Sedangkan tingkat efisiensi tertinggi

terjadi pada retribusi parkir dimana rata-rata biaya yang dikeluarkan mencapai 22,03%, sedangkan efisiensi terendah terjadi pada retribusi pelayanan kesehatan yang hanya membutuhkan biaya 0,93%. Berdasarkan data tersebut, rata-rata efisiensi pemungutan pajak mencapai 16,17%, sedangkan efisiensi pemungutan retribusi daerah mencapai rata-rata 4,83%. Artinya masih di bawah 100%, sehingga pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Wonogiri sudah efisien.

I. Saran

Berdasarkan pembahasan analisis hasil dan kesimpulan, penulis mengajukan saran

1. Pemda perlu mengusulkan pada Pemerintah Pusat untuk menetapkan tarif pajak yang kompetitif. Penurunan tarif pajak diyakini akan merangsang wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu.
2. Pajak daerah merupakan komponen yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, oleh karena itu pajak daerah harus terus ditingkatkan. Prosentasi kenaikan tarif pajak daerah bukan merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan jumlah pendapatan karena kenaikan tarif pajak daerah akan memberatkan wajib pajak dan mematikan sektor ekonomi. Jumlah pendapatan dari pajak daerah dapat ditingkatkan dengan mengawasi penarikan yang lebih baik. Contohnya pajak parkir, jumlah pajak parkir sebetulnya sangat banyak tetapi kurang dimaksimalkan sehingga perolehan tidak dapat ditingkatkan.
3. Retribusi daerah mempunyai jumlah yang besar akan tetapi tingkat pengaruh lebih kecil dibanding pajak daerah. Hal ini dikarenakan rumah sakit umum

hanya melakukan pelaporan kepada kantor Kabupaten Wonogiri saja, sementara pemasukan dan pengeluaran di tangani sendiri. Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang menyangkut kesehatan yang diterima oleh masyarakat dari rumah sakit umum. Walaupun pengaruhnya lebih kecil bukan berarti retribusi tidak penting, retribusi harus tetap ditingkatkan melalui penerimaan-penerimaannya karena retribusi tetap mempunyai pengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

4. Pajak dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh, oleh karena itu pajak dan retribusi daerah harus ditingkatkan. Peningkatan pajak dan retribusi daerah dapat dilakukan dengan menambah jumlah tenaga kerja, hal ini dapat membantu penarikan yang datang langsung kepada wajib pajak dengan sistem *door to door*. Penambahan tenaga kerja ini dilakukan agar tidak memakan waktu yang banyak, mengingat jangkauan wilayah yang sangat luas. Pajak dan retribusi dapat ditingkatkan dengan memperbaiki sistem penarikan dan pengelolaan, perbaikan sistem dan pengelolaan diharapkan akan mampu menambah jumlah pajak dan retribusi daerah. Perbaikan sistem dan pengelolaan akan meminimalisir adanya korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE UGM, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2001. *Perpajakan*. Penerbit :Andi, Yogyakarta.
- Masykur W. 2000. Penelitian Objek Pendapatan Kabupaten Kendal. Tidak dipublikasikan, kerjasama Bappeda Daerah Kabupaten Kendal dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2001 *tentang Pajak Daerah*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 *tentang Retribusi Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Udjianto, Welly Didit. 2007. *Efisiensi Pajak Daerah Suatu Tinjauan Elastisitas (Studi Kasus di Kota Yogyakarta 2001-2005)*. *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 1, Hal : 1-10.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000, *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2009 Pasal 1 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.